



Dua Fraksi Sorot Temuan BPK

PONTIANAK-RK. Dua fraksi di DPRD Kalimantan Barat menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pandangan umum dan rekomendasi mereka terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang pertanggungjawaban APBD 2014, kemarin.

Fraksi Perkasa yang merupakan gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam pandangan umumnya, mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) aset Pemprov Kalbar sebagai bentuk partisipasi politik Dewan untuk meningkatkan kinerja

■ Halaman 6

Dua Fraksi Sorot Temuan BPK

pemerintah di masa mendatang.

"Kami berharap usulan membentuk Pansus aset dapat diterima dengan pikiran jernih. Bukan untuk mencari kelemahan dari pemerintah daerah, tetapi untuk memberikan dukungan dan menunjukkan peran Dewan menyelesaikan aset-aset yang setiap tahun selalu menjadi catatan BPK," ujar juru bicara Fraksi Perkasa, Mad Nawir, Kamis (11/6).

Fraksi Perkasa juga mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar agar tidak cepat berbangga dan puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang memiliki 1.329 temuan dengan nilai Rp147,24 miliar.

BPK sendiri, dinilai oleh Fraksi Perkasa, telah baik hati untuk memberikan kesempatan melakukan perbaikan dan tindak lanjut. "Kami berharap SKPD yang bermasalah untuk segera fokus dan menyelesaikan masalah dan kepada gubernur agar melaksanakan tindakan tegas terhadap SKPD yang bersangkutan," tegas Mad Nawir.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Hendri, juga mengatakan sejumlah temuan BPK itu perlu mendapat perhatian Pemprov Kalbar. "Fraksi kami hanya perlu mengingatkan kepada kita semua, bukan berarti opini WTP tidak ada lagi tindak-pindana Korupsi," ungkapnya.

Menurut Hendri, pihaknya berharap tetap ada panitia kerja yang akan dibentuk DPRD Kalbar untuk memonitor tindak lanjut terhadap temuan BPK RI tersebut.

Diberitakan, Laporan Keuangan tahun 2014 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai tersaji WTP oleh BPK pada Senin (8/6). Namun, pengelolaan aset tetap tanah, peralatan mesin, bangunan, pada enam SKPD (PU, Pertanian, Biro Umum, Dispenda, Dikbud, plus RSUD Soedarso) perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.

Dan, ternyata, terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah TA 2014 di Dinas PU Kalbar sebesar Rp20,79 miliar. Serta, laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah sebesar Rp420 juta, kemudian belanjanya bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1,08 Miliar yang perlu disampaikan BPK RI kepada gubernur.

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, menjawab permintaan Dewan. Ia mengakui memang masih ada beberapa hal yang masih harus ditindaklanjuti.

"Memang diberikan opini WTP yang mana tahun lalu dengan catatan, kali ini tidak. Seingat saya, tahun lalu rekomendasi itu ada 1800-an. Sekarang sangat sedikit sebenarnya. Keinginan kita sama dengan Dewan, ingin membereskan itu," ungkapnya, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, Pemprov Kalbar sendiri saat ini masih mengalami beberapa kendala untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut. "Salah satunya mengenai sertifikasi. Itu tidak bisa semata-merta kita selesaikan karena melibatkan BPN yang berhak mengeluarkan sertifikat. Tentu ada biaya dan kita perlu penganggaran dan sebagainya, dan jika jumlahnya banyak berarti harus pelan-pelan," ujar Christiandy.

Tidak hanya mengenai aset daerah, dia juga mengatakan Pemprov akan menelaah semua yang menjadi atensi BPK melalui Inspektorat. "Semuanya akan kita telaah, termasuk penggunaan bantuan dana Parpol yang belum disampaikan," pungkask Christiandy.

Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbal